

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN KUALITAS DATA SPASIAL KKP
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA
MENUJU KOTA LENGKAP
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
(Studi Pada Data Spasial Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan
Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
SELA KRISTINA
NIT. 19283227

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Complete City is a manifestation of valid data quality with a database of all Complete Village, validity both spatially there are no gaps and overlaps and juridically means that all land documents uploaded to the KKP system are built to provide electronic-based excellent service. Surabaya City Land Office I seeks to realize a Complete City in 2023 by improving the quality of KW 4-6 data and solving problems on the KKP registration map. The purpose of this research is to determine the conditions, causes, and strategies to realize the quality of spatial data valid without gaps and overlaps. The research method was carried out qualitatively description with data acquisition carried out through interviews, observations, and document studies of literature reviews and technical guidelines issued by the Ministry of ATR / BPN. The analysis was carried out qualitatively description. The results showed that the condition of spatial data quality of KKP Ketintang Village is quite good but there are still anomalies such as overlap, gap, misplace, wide difference, and changes in village names that must be resolved. The contributing factors include computerized system factors, human error, and differences in measurement time, as well as mapping problems. Three strategies that can be implemented such as spatial strategy with Block Adjustment, legal strategy with a land registration program, and institutional strategy by building capacity human resources in the direction of changing the orientation of land parcel mapping.

Keywords: Complete City, Data Quality, KKP, Strategy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis	10
C. Kerangka Pikir Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian.....	28
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	29
C. Definisi Operasional Konsep	29
D. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Kota Surabaya.....	37

B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
C. Profil Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.....	40
BAB V PENYELESAIAN PERMASALAHAN KUALITAS DATA SPASIAL KKP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I.....	47
A. Kondisi Kualitas Data Spasial Peta Pendaftaran KKP Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.....	47
B. Faktor Penyebab dari Permasalahan Data Spasial Peta Pendaftaran KKP Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.....	59
C. Strategi Penyelesaian Kualitas Data Spasial KKP Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Menuju Kota Lengkap	75
BAB VI PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman memasuki era komputerisasi, pelayanan kepada masyarakat berubah dari sistem manual menjadi sistem digital. Dengan perubahan sistem ini, Kementerian ATR/BPN terus gencar untuk melakukan perbaikan dan pembenahan kualitas data pertanahan guna meningkatkan pelayanan pertanahan secara elektronik. Salah satu target yang menjadi fokus terkini yaitu menjadikan seluruh kabupaten/kota di Indonesia menjadi Kota/Kabupaten Lengkap yang arah tujuan nantinya akan diupayakan menjadi Provinsi Lengkap. Dalam upaya mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap, kualitas data pertanahan harus valid sebagaimana yang sering disampaikan Menteri ATR/BPN Bapak Hadi Tjahjanto mengutip dari Detik.com, pada saat mendeklarasikan Kota Denpasar sebagai Kota Lengkap pertama di Indonesia bahwa Kota Lengkap berarti secara spasial kualitas data pada peta tidak ada *overlap* dan *gap* dari bidang satu ke bidang lainnya dan secara yuridis dibuktikan dengan Buku Tanah dan Surat Ukur yang telah diunggah secara elektronik dan akurat di sistem komputerisasi BPN (Nor, 2023).

Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, setiap Kantor Pertanahan mempunyai misi untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap. Dalam JUKNIS PTSL tahun 2022 dijelaskan Kabupaten/Kota dapat dikatakan sebagai Kota Lengkap apabila kondisi seluruh bidang tanah telah terdaftar dan terpetakan valid dengan kualitas data yang valid dalam KW 1 valid dan sesuai dengan posisi di lapangan. Adanya Kota Lengkap nantinya akan mempermudah dan mempercepat pelayanan pertanahan berbasis elektronik dengan memaksimalkan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). KKP merupakan sistem komputerisasi yang memuat peta spasial yang digunakan untuk kegiatan pelayanan pertanahan sehingga bidang-bidang tanah yang terpetakan harus valid agar pelayanan kepada masyarakat tidak terdapat

keraguan. Kota Lengkap dan kualitas data merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kondisi kualitas data valid (KW 1) akan mendukung terwujudnya Kota Lengkap yang kemudian *output* dari Kota Lengkap yang berkualitas akan mewujudkan administrasi pertanahan lengkap. Disamping itu perwujudan Kota Lengkap juga untuk membangun Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dengan *output database* elektronik yang lengkap dan valid. Indikator yang digunakan untuk melihat kualitas data pertanahan digital secara spasial yaitu tidak tumpang tindih dengan bidang tanah lain dan penggambaran bidang tidak melenceng dari lokasinya (Marryanti and Nurrokhman, 2019).

Berdasarkan JUKNIS PTSL tahun 2023 disebutkan bahwa untuk mewujudkan kualitas data yang valid dilakukan peningkatan kualitas data yang dilakukan baik untuk bidang tanah terdaftar terpetakan KW 1, KW 2, KW 3 maupun bidang tanah terdaftar belum terpetakan KW 4, KW 5, KW 6 dan bidang tanah yang terdaftar yang dilakukan secara sistematis lengkap. Bidang tanah KW 1, KW 2, KW 3 merupakan bidang tanah yang telah terdaftar dan terpetakan pada Aplikasi KKP. Bidang-bidang tanah tersebut seharusnya telah terpetakan sesuai dengan dokumen pertanahan, namun kenyataannya antara bidang yang satu dengan yang lain masih terdapat permasalahan spasial sehingga dapat mempengaruhi validitas data spasialnya. Untuk mewujudkan Kota Lengkap maka bidang-bidang tanah yang belum valid tersebut harus dilakukan pembenahan agar kualitas data spasial yang diperoleh valid baik fisik maupun yuridis. Validitas dapat tercapai apabila data spasial tidak terdapat tumpang tindih, data spasial dan tekstual saling berkorelasi yaitu dengan cara dilakukan proses integrasi *link* antara data tekstual dan spasial menggunakan data penghubung berupa NIB, atau Nomor Hak, atau Nomor SU. Ketiadaan data penghubung tersebut akan berakibat pada kualitas data (KW) bidang tanah yang dihasilkan. Penataan spasial perlu dilakukan sebab bidang tanah memiliki sifat dinamis karena statusnya yang berubah-ubah, baik karena jual beli, pemecahan bidang, pemisahan, pewarisan dan lain sebagainya (Bashit, Sujianto and Utomo, 2020). Oleh karena hal tersebut maka sangat dimungkinkan apabila manajemen pertanahan tidak dilaksanakan dengan baik

maka terjadi *overlapping* yang menyebabkan bidang menjadi tidak dapat divalidasi.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I merupakan salah satu kantor yang ditargetkan sebagai Kota Lengkap. Oleh karena hal tersebut, pada tahun 2022 dengan penunjukkan DIRJEN SPPR (SK DIRJEN SPPR Nomor 258/SK-300.UKK/VIII/2022), Kantor Kota Surabaya I melaksanakan Program PTKL yang terdiri dari semua kelurahan yang ada dengan jumlah 75 kelurahan. Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL) adalah pendaftaran tanah yang dilakukan dalam satu Kabupaten/Kota berbasis Desa/Kelurahan Lengkap dengan jumlah bidang terdaftarnya di atas 80% (delapan puluh perseratus) dan bidang tanah yang belum terdaftarnya tersebar secara sporadik (JUKNIS PTKL 2019). Dari pernyataan tersebut PTKL merupakan lanjutan dari PTSL yang dapat dilaksanakan dengan telah terpenuhinya kriteria dari program PTKL. Program PTKL yang dijalankan meliputi peningkatan kualitas data K4 (KW 4, KW 5, KW 6) dan kegiatan penataan spasial bidang tanah KW 1, KW 2, KW 3.

Dari 75 kelurahan wilayah kerja Kantor Kota Surabaya I, sementara baru terdapat 8 (delapan) kelurahan yang sudah menjadi Kelurahan Lengkap. Dengan minimnya jumlah desa yang telah dideklarasikan dari total kelurahan yang ada hal tersebut menunjukkan bahwa bidang-bidang tanah belum terpetakan dengan benar dan valid (Handono, Suhattanto and Nugroho, 2020). Data spasial bidang tanah pada aplikasi KKP Kantor Pertanahan seharusnya telah terpetakan sesuai dengan data fisik di lapangan, Buku Tanah, dan Surat Ukur sehingga dapat menjamin kepastian hukum kepemilikan bidang tanah. Namun, kondisi yang ada masih banyak terdapat permasalahan spasial seperti antar bidang tanah terdaftar dan terpetakan (KW 1, KW 2, KW 3) mengalami *overlap*, *gap* maupun *misplace* yang ditemukan pada sistem aplikasi KKP sehingga bidang tanah belum dapat divalidasi dan Desa/Kelurahan Lengkap belum dapat tercapai. Kegiatan PTKL dilakukan selain untuk meningkatkan kualitas data menjadi KW 1 dan valid juga untuk menjaga kualitas data pada kantor pertanahan yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan pertanahan

kepada masyarakat. Kegiatan penyelesaian ini utamanya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik baik dari segi kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu serta juga berhubungan dengan peningkatan kualitas data bidang tanah KW 4, KW 5, KW 6 agar bidang tanah tersebut nantinya dapat terpetakan dengan benar dan sesuai posisi sebenarnya serta tidak tumpang tindih dengan bidang yang sudah terpetakan pada sistem KKP.

Pada berbagai penelitian yang sudah diteliti, pembahasan yang diteliti dominannya berfokus pada peningkatan kualitas data K4 yaitu pada KW 4, KW 5, KW 6 yang belum terpetakan pada sistem KKP. Hal tersebut dikarenakan program Kementerian ATR/BPN dalam rangka percepatan pendaftaran tanah yaitu seluruh bidang tanah harus terdaftar dan terpetakan pada tahun 2025 (Rahmawati, 2022). Oleh karena hal itu penelitian terkait dengan data spasial bidang tanah yang telah terdaftar dan terpetakan pada Peta Pendaftaran sistem KKP belum banyak diteliti, mengingat kualitas data pertanahan yang valid penting dalam mendukung pelayanan elektronik.

Dengan melihat uraian tersebut diatas maka perlu adanya penelitian tentang penyelesaian permasalahan kualitas data spasial KKP bidang tanah terdaftar terpetakan meliputi identifikasi kondisi, penyebab dan cara membangun strategi terbaik sebab kualitas data pertanahan yang valid merupakan salah satu indikator yang dibutuhkan untuk mencapai Desa/Kelurahan Lengkap dan mendukung terwujudnya Kota Lengkap. Oleh karena itu Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Permasalahan Kualitas Data Spasial KKP Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Menuju Kota Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Studi Pada Data Spasial Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya)”.

B. Rumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I merupakan salah satu kantor yang ditargetkan menjadi Kota Lengkap. Namun, kualitas data pada tiap kelurahan belum seluruhnya valid terutama pada data spasial bidang-bidang tanah yang telah terpetakan dan terposisikan pada aplikasi KKP masih banyak ditemukan permasalahan seperti adanya *overlap*, *misplace* maupun *gap* bidang tanah

sehingga belum dapat tervalidasi. Oleh karena itu diperlukan strategi penyelesaian bidang-bidang tanah tersebut agar seluruh kelurahan dapat menjadi Kelurahan Lengkap sebagai basis data Kota Lengkap sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS-300.UK01.01/II/2019 yaitu memenuhi aspek kebenaran letak, bentuk, luas dan standar penomoran. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang disusun oleh Peneliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi kualitas data spasial Kelurahan Ketintang pada Peta Pendaftaran KKP Kantor Pertanahan Kota Surabaya I?
2. Apa faktor penyebab dari permasalahan spasial yang ditemukan pada Peta Pendaftaran KKP Kantor Pertanahan Kota Surabaya I?
3. Bagaimana strategi penyelesaian permasalahan data spasial yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dalam rangka mencapai Deklarasi Kota Lengkap?

C. Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian digunakan agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang ingin diteliti dan tidak meluas dari pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada kualitas data spasial yang diteliti adalah data bidang-bidang tanah Kelurahan Ketintang yang sudah terdaftar dan terpetakan pada sistem KKP Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Mengetahui kondisi kualitas data spasial Kelurahan Ketintang pada Peta Pendaftaran sistem KKP Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
 - b) Mengetahui faktor penyebab dari permasalahan kualitas data spasial yang ditemukan pada sistem KKP Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

- c) Mengetahui strategi penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk mewujudkan data spasial KKP valid dalam rangka peningkatan kualitas data untuk mencapai Deklarasi Kota Lengkap.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup 3 hal, yaitu:

- a) Kegunaan dari penelitian bagi penulis dan pembaca yaitu sebagai tambahan pengetahuan mengenai permasalahan kualitas data spasial KKP pada kegiatan peningkatan kualitas data menuju Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
- b) Kegunaan dari penelitian bagi Kementerian ATR/BPN adalah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terkait penyelesaian permasalahan kualitas data spasial KKP, karena setiap kantor pertanahan mempunyai permasalahan spasial yang berbeda dalam strategi membangun peningkatan kualitas data spasial.
- c) Kegunaan dari penelitian ini bagi masyarakat yaitu memberikan kepuasan layanan dengan tervalidasinya seluruh bidang tanah yang kemudian akan membantu mempermudah dan mempercepat layanan pertanahan elektronik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi kualitas data spasial Kelurahan Ketintang secara visual pada Peta Pendaftaran KKP dapat dikatakan cukup baik karena terlihat hanya sebaran sedikit bidang tanah yang memiliki variasi persil dengan warna merah, biru, kuning, hijau. Namun, setelah dilakukan pengecekan dengan aplikasi ArcGIS diketahui untuk anomali *overlap* yaitu sebanyak 1000 *errors* dan *gap* sebanyak 525 *errors*. Selain *overlap* dan *gap* terdapat permasalahan lain yang terjadi seperti beda luas, bidang tanah belum divalidasi, bidang belum terdaftar dan perubahan nama wilayah kelurahan. Berdasarkan permasalahan tersebut berarti masih terdapat perbedaan antara data pada arsip dokumen pertanahan dengan data pada sistem KKP.
2. Faktor penyebab dari permasalahan yang ada pada kualitas data spasial Kelurahan Ketintang dalam sistem KKP antara lain yaitu a) Keterbatasan sistem sebelum adanya komputerisasi, b) Sistem komputerisasi belum sempurna, c) Masalah pemetaan, d) Perbedaan waktu pengukuran, e) *Human error*, dan f) Adanya perubahan nama wilayah lingkungan menjadi kelurahan, serta g) Terbatasnya anggaran.
3. Terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Strategi Spasial

Penggunaan *Block Adjustment* dalam rangka melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kualitas data serta metode fotogrametris dalam pemetaan bidang tanah.
 - b. Strategi Legal

Secara legal pada bidang-bidang tanah K 3.3 agar menjadi K 1 dapat dilakukan dengan kegiatan sertifikasi tanah seperti pada

program PTSL. Kemudian untuk penataan spasial dapat menggunakan petunjuk informasi yang ada pada arsip dokumen pertanahan (SU/GS/BT). Selanjutnya terhadap permasalahan Buku Tanah yang seharusnya sudah tidak aktif maka dilakukan penonaktifan Buku tanah yang dilakukan oleh Seksi PHP (Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah) agar diperoleh kesesuaian data antara sistem KKP dengan data fisik dokumen pertanahan.

c. Strategi Institusional

Mengoptimalkan SDM internal yang ada dan menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pemohon. Dalam arah pemetaan di masa depan, kantor pertanahan harus mempersiapkan untuk membangun SDM berkapasitas dan mampu melakukan integrasi hasil pemetaan dengan metode fotogrametris. Selain SDM internal, dapat dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan STPN dan pihak kelurahan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin agar kualitas data yang dihasilkan akurat dan *reliable* sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari serta agar Deklarasi Kota Lengkap tahun 2023 tercapai sesuai dengan rencana.
2. Kantor pertanahan perlu mempersiapkan untuk membangun SDM berkapasitas dan mampu melakukan integrasi hasil pemetaan dengan metode fotogrametris dalam arah perubahan orientasi pemetaan bidang tanah terintegrasi.
3. Perlu adanya penelitian terkait dengan implementasi penggunaan *Block Adjustment* dalam peningkatan kualitas data spasial untuk melihat keberhasilan, *reliability* dan tingkat akurasi dalam penyelesaian penataan spasial bidang tanah.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN-PERATURAN

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/Juknis-300.UK.01.01/II/2019. Direktorat Jenderal Keagrariaan dan Tata Ruang/BPN. Jakarta

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 001/Juknis-100.HK.02.01/I/2022. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Jakarta

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 003/Juknis-HK.02/III/2023. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Jakarta

BUKU

- Fatimah, F. N. A. D. (2016). Teknik analisis SWOT. Anak Hebat Indonesia.
- Hikmawati, F. (2017). Metodologi Penelitian, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Satori, D. A., & Komariah, A. (2014). Metodologi penelitian kualitatif, Cet. 4. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono, P. (2016). Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (*Mixed Methods*). Penelitian Tindakan (*Action Research*, dan Penelitian Evaluasi). Bandung: Alfabeta Cv.

JURNAL-JURNAL

- Adlini, M. N. Et Al. (2022) 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), Pp. 974–980. Doi: 10.33487/Edumaspul.V6i1.3394.
- Bashit, N., Sujianto, U. And Utomo, D. C. (2020) 'Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Kota Lengkap', Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Undip 2020, Pp. 217–220.
- Basir, A., Nila, M. And Dewi, K. (2023) 'Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (*Overlapping*)', 5(1), Pp. 175–188.
- Fuad (2019) 'Strategi Dan Progres Perwujudan Pulau Lengkap (Studi Di Pulau Medang Kabupaten Sumbawa)'.
Handono, A. B., Suhattanto, M. A. And Nugroho, A. (2020) 'Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar', Tunas Agraria, 3(3). Doi: 10.31292/Jta.V3i3.125.
- Haryani, D. And Frinaldi, A. (2020) 'Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang', Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan, 3(4), Pp. 687–698. Available At: [Http://Perspektif.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Perspektif/Article/View/346](http://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/346).
- Hidayat, F. And Nagara, R. P. (2019) 'Dataset Batas Wilayah Administrasi Untuk Penataan Ruang Wilayah', Seminar Nasional Geomatika, 3, P. 441. Doi: 10.24895/Sng.2018.3-0.984.

- Luthfina, M. A. W., Sudarsono, B. And Suprayogi, A. (2019) ‘Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Pati’, *Jurnal Geodesi Undip*, 8(1), Pp. 74–82.
- Marryanti, S. And Nurrokhman, A. (2019) ‘Kesiapan Data Pertanahan Menuju Pelayanan *Online*’, *Administrasi Pertanahan Dan Tata Ruang Di Indonesia Mrnuju Modern, Digital Dan Terpercaya*, Pp. 20–34.
- Mawadah, M. (2021) ‘Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan’, *Tunas Agraria*, 4(2), Pp. 168–174. Doi: 10.31292/Jta.V4i2.143.
- Mustofa, F. C. (2020) ‘*Evaluation Of Land Information System Development In The Ministry Of ATR/BPN*’, *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), Pp. 158–172.
- Pidu, R. E., Sudarsono, B. And Amarrohman, F. J. (2019) ‘Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Kawasan Industri Dan Lahan Terbangun Terhadap RTRW Di Kecamatan Bawen Dan Kecamatan Pringapus Menggunakan Sistem Informasi Geografis’, *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1), Pp. 295–304.
- Purba, R. S. And Bandhono, F. A. (2021) ‘Kajian Pemetaan Kelurahan Lengkap Terdaftar Berdasarkan Implementasi Di Kantor Pertanahan Kota Pontianak’, *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (Fit)- Ikatan Surveyor Indonesia (Isi)*, 1, Pp. 53–61. Available At: <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/606/>.
- Rahmawati, N. (2022) ‘Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap’, *Tunas Agraria*, 5(2), Pp. 127–141. Doi: 10.31292/Jta.V5i2.177.
- Sugijanto (1982) ‘Peralihan Desa Menjadi Kelurahan Di Kotamadya Surabaya’, *Skripsi Universitas Airlangga*.
- Suhattanto, M. A. Et Al. (2021) ‘Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik’, *Widya Bhumi*, 1(2), Pp. 100–114. Doi: 10.31292/Wb.V1i2.11.
- Tenrisau, A. (2021) ‘Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan’, *Jurnal Pertanahan*, 11(2), Pp. 103–112. Doi:

10.53686/Jp.V11i2.109.

Yusanto, Y. (2020) ‘Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif’, *Journal Of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), Pp. 1–13. Doi: 10.31506/Jsc.V1i1.7764.

KORAN ONLINE

Humas. 2022, ‘Presiden Serahkan 1,55 Juta Sertifikat Tanah Untuk Rakyat’, Setkab.go.id., 01 Desember 2022, dilihat pada 03 Juli 2023, <https://setkab.go.id/>.

Nor. 2023, ‘Denpasar Jadi Kota Lengkap Pertama Di Indonesia’, Detik.com, 26 Januari 2023, dilihat pada 23 Maret 2023, <https://www.detik.com>.

PUBLIKASI PEMERINTAH

Badan Pusat Statistik 2023, Kota Surabaya Dalam Angka tahun 2023, Katalog Nomor 1101001.3578, BPS, Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya RPJMD tahun 2021-2026. Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023. Kota Surabaya.

SKRIPSI

Sugijanto (1982) ‘Peralihan Desa Menjadi Kelurahan Di Kotamadya Surabaya’, Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Hardiansyah, (2020), ‘Penataan data pertanahan digital terintegrasi (studi di Kantor Pertanahan Kota Cirebon)’, Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Kastika, I. W. (2021). Strategi dan progres pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Marsya, M. A. (2023). Upaya penyelesaian bidang-bidang tanah kluster K4 dalam rangka mempercepat perwujudan kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kota Bogor (Studi Kasus: Kelurahan Sempur, Kelurahan Margajaya, dan

Kelurahan Kebonpedes), Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sumarta, P. Y. E. (2021). Strategi pencapaian deklarasi kelurahan lengkap studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Tindaon, C. W. (2021). Peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bogor, Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

VIDEO *ONLINE*

PPSDM Kementerian ATR/BPN, (2022), Perubahan *Mindset* Dalam Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi, YouTube Video, 13 November 2022, dilihat pada 03 Juli 2023, <https://www.YouTube.com/watch?v=P7KTx4KHomw&list=PLSbCPoE1XaZWM4xH-AalM9hrsTUBAZ8PZ&index=1>

WEBSITE PEMERINTAH *ONLINE*

Pemerintah Kota Surabaya, (2023), Sekilas Tentang Surabaya, dilihat pada 29 Mei 2023, <https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/>.